



## **Pentingnya Kehadiran Negara dalam Konflik Masyarakat – Korporasi: Pengalaman Masyarakat Pangkalan Susu Menolak PLTU Batubara**

Surya Dua Artha Simanjuntak<sup>1\*</sup>, Bengkel Ginting<sup>1</sup>, Randa Putra Kasea Sinaga<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Indonesia

### **Abstrak**

Dalam urusan kepentingan ekonomi, hubungan antara masyarakat dengan korporasi sering saling bertentangan. Salah satu contohnya konflik antara masyarakat Pangkalan Susu dengan korporasi pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di daerah mereka. Masyarakat menganggap pengoperasian PLTU telah menyebabkan kerusakan lingkungan, yang akibatnya berdampak buruk ke penghasilan dan kesehatan mereka. Penelitian dilakukan untuk menggali pengalaman masyarakat Pangkalan Susu dalam menghadapi dampak buruk pengoperasian PLTU tersebut. Sampling purposif digunakan untuk merekrut informan. Menggunakan pendekatan analisis fenomenologis interpretatif, dilakukan wawancara mendalam kepada tiga informan. Ditemukan bahwa ketidakhadiran negara dalam konflik ini membuat masyarakat makin terpuruk. Padahal Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, perlu melindungi rakyatnya dari pengaruh buruk kapitalisme. Apalagi mayoritas masyarakat Pangkalan Susu bergantung pada alam: jika alam mereka rusak, maka penghasilan mereka juga hilang. Artikel ini ingin menjelaskan pentingnya kehadiran negara dalam konflik antara masyarakat vs. korporasi—terutama untuk melindungi masyarakat sebagai kelompok yang lebih lemah.

**Kata Kunci:** konflik, korporasi, masyarakat, negara, negara kesejahteraan

### **Abstract**

*In matters of economic interest, the relationship between community and corporations is often contradictory. One example is conflict between Pangkalan Susu community and corporations that manages Coal-fired Power Stations (Pembangkit Listrik Tenaga Uap / PLTU) in their area. The community assumes that the operation of PLTU has caused environmental damage, which in turn has a negative impact on their income and health. Research was conducted to explore the experience of Pangkalan Susu community in dealing with the adverse effects of PLTU. Purposive sampling was used to recruit informants. Using an interpretative phenomenological analysis approach, in-depth interviews were conducted with three selected informants. It was found that the absence of state in this conflict made the community worse off. Whereas Indonesia, as a welfare state, needs to protect its people from the adverse effects of capitalism. Moreover, the majority of Pangkalan Susu residents depend on nature: if their nature is damaged, their income will also be lost. This article wants to explain the importance of the state presence in conflict between community vs. corporations—mainly to protect community as a weaker group*

**Password:** community, conflict, corporations, state, welfare state

**How to Cite:** Simanjuntak, S. D. A. (2022). Pentingnya Kehadiran Negara dalam Konflik Masyarakat – Korporasi: Pengalaman Masyarakat Pangkalan Susu Menolak PLTU Batubara. Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 1 (1): 9-18.

\*Corresponding author: Surya Dua Artha Simanjuntak

E-mail: [surya2artha@gmail.com](mailto:surya2artha@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Negara sebagai integrasi kekuasaan politik mempunyai tugas mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini karena berbagai bentuk kekuasaan sering kali penuh pertentangan kepentingan (Budiardjo, 2008). Salah satu contohnya tercermin dalam konflik antara masyarakat Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, Sumatera Utara, dengan pihak pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah mereka.

PLTU yang berbahan bakar batubara itu berada di Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu. PLTU Pangkalan Susu memiliki empat unit: pembangunan Unit 1 dan 2 yang berkapasitas 2 x 200 megawatt (MW) mulai ditandatangani pada 2007 dan akhirnya beroperasi secara *commissioning* pada Maret 2015 (PLN, 2015), sedangkan Unit 3 dan 4 yang berkapasitas 2 x 210 MW dibangun pada 2015 dan beroperasi pada Juni 2019 (Hidayat, 2020). Dari data Walhi Sumut, Unit 1 dan 2 membutuhkan rata-rata 480 ribu metrik ton batubara pertahun, sedangkan Unit 3 dan 4 memerlukan sampai 2,14 juta metrik ton batubara pertahun (Karokaro, 2019a).

Sejak 2018, Unit 1 dan 2 mulai dikelola oleh Indonesia Power, anak perusahaan PT PLN Persero, sedangkan Unit 3 dan 4 dioperasikan oleh korporasi swasta, yaitu Sinohydro Corporation Limited dari Tiongkok dan PT Nusantara Energi Mandiri dari Indonesia (EJAtlas, 2020). Sebanyak 85 persen pendanaan pembangunan Unit 3 dan 4 sendiri dibiayai dengan pinjaman dari Pemerintah Tiongkok, atau sebesar USD373 juta (DJPPR Kemenkeu, 2015).

Masyarakat Pangkalan Susu sendiri merasa kehadiran PLTU di daerah mereka menimbulkan banyak masalah lingkungan, yang kemudian berdampak buruk pada perekonomian dan kesehatan mereka. Salah satu contohnya di sektor pertanian: polusi udara dari limbah PLTU diduga menyebabkan para petani sering gagal panen, pendapatan panen makin anjlok, dan bermacam penyakit tanaman pun belakangan makin sering muncul (Karokaro, 2019b).

Dampak buruk PLTU kepada pertanian warga ini makin meresahkan jika melihat fakta bahwa mayoritas masyarakat Pangkalan Susu berprofesi sebagai petani. Pada 2020, dari 9.941 warga Pangkalan Susu yang bekerja, sekitar 56 persennya berprofesi sebagai petani. Selain itu, dari total 15.135 Ha luas wilayah Pangkalan Susu, sekitar 80 persennya merupakan lahan pertanian (BPS Kab. Langkat, 2021).

Maka tak heran jika masyarakat Pangkalan Susu melakukan aksi sosial menolak pengoperasian PLTU batubara di daerah mereka. Seperti pada 22 Juni 2019, ratusan warga dengan kapal-kapal nelayan melakukan aksi di Perairan Teluk Aru, berdekatan dengan PLTU.

Mereka membentangkan banyak spanduk yang isinya penolakan penggunaan energi kotor batubara dan menuntut pengalihan ke energi terbarukan (Karakoro, 2019b).

Penggunaan bahan bakar batubara memang dianggap sebagai dalang masalah lingkungan. Laporan Greenpeace Indonesia (2016) menyatakan bahwa batubara yang dibakar di PLTU memancarkan sejumlah polutan seperti NO<sub>x</sub> dan SO<sub>2</sub>, yang jadi kontributor utama dalam pembentukan hujan asam. Hujan asam inilah yang memberi dampak buruk kepada pertanian, seperti pH air makin rendah sehingga pertumbuhan tanaman jadi tak optimal, perkembangan akar yang terhambat sehingga nutrisi yang diambil dari tanah tak optimal, dan merusak lapisan lilin di daun sehingga daun lebih mudah terserang jamur serta hama (Nasihah, 2017). Sejalan dengan itu, penelitian di pembangkit listrik termal Kolaghat, Bengal Barat, India, juga menunjukkan bahwa limbah hasil pembakaran batubara buat kesuburan tanah semakin berkurang dan biaya produksi bertani semakin tinggi. Hasilnya, komunitas tani di sekitar pembangkit listrik itu hilang minat membudidayakan tanaman (Subhas, 2017).

Banyak penelitian di berbagai PLTU batubara di Indonesia juga menunjukkan bahwa limbah yang dihasilkan menyebabkan kerusakan di lingkungan sekitarnya (Pramanik dkk, 2020; Urrohmah dkk, 2020; Widiawaty dkk, 2020; Pratama dkk, 2021; Greenpeace Indonesia, 2016). Dampak buruk kepada lingkungan inilah yang sering jadi penyebab konflik antara masyarakat dengan korporasi pengelola PLTU. Konflik di PLTU Teluk Sepang, Bengkulu contohnya: kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat buat mereka menuntut biaya ganti rugi dan penutup PLTU. Negosiasi antara masyarakat dengan korporasi pengelola PLTU ternyata tak kunjung mencapai kata sepakat. Alhasil, pihak ketiga—yaitu negara—hadir sebagai penyelesai konflik. Dalam hal ini, BKSD (Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam) Bengkulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Bengkulu yang mengambil peran: BKSD mencari tahu kebenaran apakah benar pengoperasian PLTU berdampak buruk pada lingkungan dan PTUN memutuskan apakah menerima atau menolak gugatan dari warga atas pencabutan izin PLTU (Pratama dkk, 2021).

Kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan korporasi memang dirasa penting, terutama di negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti Indonesia. Hal ini karena sistem negara kesejahteraan berguna untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk sistem pasar terbuka atau kapitalisme (Briggs, 1961).

Garland (2014) mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sistem khas pemerintahan yang berfokus mengatur pasar (ekonomi), menyediakan jaminan sosial, dan menjamin ketentuan sosial (*social provision*). Urgensi negara kesejahteraan jadi semakin nyata karena kini hampir seluruh masyarakat dunia hidup dalam sistem kapitalisme. Padahal, Garland

berargumen, kapitalisme sebagai sistem ekonomi pada dasarnya anti-sosial: kapitalisme menciptakan konsentrasi kekayaan dan ketidaksetaraan, sehingga pada kesempatannya akan menghasilkan krisis akumulasi dan keruntuhan ekonomi secara berkala. Jadi, masyarakat yang hanya diatur oleh sistem kapitalisme sangat beresiko. Untuk meminimalisir resiko tersebut, maka diperlukan sistem tandingan dan negara kesejahteraan adalah jawabannya. Singkatnya, negara kesejahteraan adalah sistem kontrol sosial dari proses ekonomi kapitalis.

Dalam kasus di Pangkalan Susu sendiri, hubungan antara pengoperasian PLTU, masyarakat, dan negara penuh kontradiksi. Oleh karena itu, dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin menggali pengalaman masyarakat Pangkalan Susu dalam menghadapi dampak buruk pengoperasian PLTU batubara di daerah mereka. Didapati bahwa dampak buruk PLTU kepada lingkungan menyebabkan konflik antara masyarakat dengan korporasi pengelola PLTU. Dari konflik masyarakat vs. korporasi itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran negara dirasa sangat diperlukan. Artikel ini sendiri ingin menjelaskan bagaimana ketidakhadiran negara dalam konflik ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menipis dan kesejahteraan mereka semakin terancam—terutama bagi yang sumber penghasilannya dari alam.

## **METODE PENELITIAN**

Agar pengalaman masyarakat Pangkalan Susu dapat digali secara murni dan jernih, maka jenis penelitian dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretatif. Ini karena dalam penelitian fenomenologis peneliti harus melihat pengalaman informan tanpa dikendalikan oleh asumsi dan pandangan teoritis tertentu. Untuk mencapai hal itu, dalam fenomenologis interpretatif peneliti harus terus-menerus merevisi pandangan pribadi hingga muncul pemahaman yang jernih atas pengalaman informan (Kahija, 2017).

Informan dipilih menggunakan teknik secara sengaja (*purposive sampling*). Dalam pendekatan fenomenologis interpretatif, ukuran sampel yang digunakan kecil (*small sample size*). Menurut Jonathan A. Smith dalam Kahija (2017), jumlah informan yang kecil membuat peneliti bisa melakukan analisis yang mendalam untuk masing-masing pengalaman informan. Dalam mencari informan, peneliti dibantu oleh Sumiati Surbakti, Direktur Yayasan Srikandi Lestari—LSM yang mendampingi masyarakat Pangkalan Susu dalam konflik dengan PLTU. Terpilih tiga informan dengan masing-masing nama (samaran): Leila, Salim, dan Sari. Leila, Salim, maupun Sari merupakan masyarakat Pangkalan Susu yang ikut terlibat dalam aksi sosial menolak pengoperasian PLTU.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Selain itu, dilakukan

juga observasi lapangan untuk memahami dan memastikan konteks hasil wawancara dalam situasi riil. Kemudian hasil transkrip wawancara dianalisis dalam lima tahap (Kahija, 2017), yaitu:

1. Penghayatan transkrip, yaitu dengan membaca ulang transkrip wawancara hingga kesadaran informan dengan kesadaran peneliti.
2. Pencatatan awal, yaitu memberi komentar (pernyataan) awal dalam transkrip yang dirasa penting.
3. Perumusan tema emergen, yaitu membuat tema dari komentar awal. Di sini, tema tak lagi berupa pernyataan, melainkan kata atau kelompok kata.
4. Perumusan tema subordinat, yaitu pemadatan tema emergen. Artinya, tema-tema emergen yang memiliki kemiripan makna dipadatkan jadi satu.
5. Perumusan tema superordinat antarinforman, yaitu menghubungkan tema-tema subordinat setiap informan yang terkait dan akhirnya merumuskan tema apa saja yang menonjol pada (hampir) setiap informan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil analisis data, didapati tiga tema superordinat antarinforman yang menarik terkait hubungan antara masyarakat, PLTU, dan negara, yaitu ketiga informan merasa: (1) dijajah, (2) tak diakui, dan (3) krisis kepercayaan kepada pihak yang punya tanggung jawab.

Baik Leila, Salim, maupun Sari merasa dijajah oleh PLTU. Korporasi pengelola PLTU dianggap sebagai ‘sosok luar’ yang seenaknya menguasai tanah masyarakat Pangkalan Susu. Kehadiran PLTU membuat masyarakat merasakan penindasan, terutama karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pengoperasian PLTU, yang akhirnya juga berdampak buruk pada penghasilan dan kesehatan mereka.

Leila, sebagai seorang petani yang tinggal di Pintu Air—desa yang berada di *ring* 1 PLTU, mengaku sawahnya jadi sering terkena penyakit, mudah tumbang, hasil panen berkurang, bahkan gagal panen setelah ada PLTU. Ia membandingkan, sebelum ada PLTU, pendapatan dari panen bisa untuk beli motor dan renovasi rumah, namun sekarang hanya untuk menutupi modal produksi dan makan saja.

Begitu juga dengan Salim, yang tinggal di Sei Siur, desa yang juga berada di *ring* 1 PLTU Pangkalan Susu. Ia merasa kehadiran PLTU sebagai ancaman. Sebelum ada PLTU ia makmur jadi nelayan, namun kehadiran PLTU di perairan Pangkalan Susu buat biota laut jadi berkurang. Limbah hasil pengoperasian PLTU diyakini jadi penyebabnya. Akhirnya, kini ia berhenti jadi nelayan karena penghasilannya tak bisa lagi menutupi biaya operasi jadi nelayan.

Untuk Sari, yang juga tinggal di Desa Sei Siur, mengaku setelah adanya PLTU, ia dan anaknya jadi mengidap penyakit kulit parah. Padahal sebelumnya ia tak pernah terkena penyakit serupa. Ia yakin limbah buangan PLTU penyebabnya, apalagi setelah beberapa anak lain di sekitar lingkungan juga mengidap penyakit serupa. Penghasilan rumah tangganya kini banyak terserap untuk beli obat-obatan untuk penyakitnya. Ia merasa tertindas akibat kehadiran PLTU.

Dampak buruk lingkungan akibat pengoperasian PLTU batubara yang dirasakan Leila, Salim, dan Sari ini sejalan dengan banyak penelitian terdahulu. Penelitian Subhas dkk (2017) di arel radius 4 km sekitar pembangkit listrik termal Kolaghat, Bengal Barat, India menyatakan bahwa limbah pembakaran batubara menyebabkan kesuburan tanah jadi berkurang, biaya produksi pertanian makin meningkat, dan akhirnya banyak petani yang alih profesi. Penelitian Widiawaty dkk (2020) di PLTU Cirebon, Jawa Barat juga menunjukkan bahwa limbah batubara berefek buruk pada kualitas air di perairan sekitar PLTU, hasilnya biota laut terganggu dan nelayan makin sulit menangkap ikan. Sedangkan penelitian dari Greenpeace Indonesia (2016) di PLTU Jepara dan PLTU Batang, Jawa Tengah menunjukkan dampak buruk hasil limbah pembakaran batubara kepada kesehatan masyarakat sekitar. Bahkan, mereka mengestimasi kematian dini pertahun akibat limbah pembakaran batubara mencapai 1.020 orang lewat pengoperasian PLTU Jepara dan 780 orang lewat pengoperasian PLTU Batang.

Indonesia secara prinsip adalah negara kesejahteraan (Palguna, 2019), namun dari pengalaman masyarakat Pangkalan Susu tampaknya pemerintah belum maksimal menjalankan tugasnya melindungi masyarakat dari pengaruh buruk sistem kapitalisme. Negara kesejahteraan tak hanya menyangkut subsidi dan bantuan langsung dari pemerintah, namun dalam cakupan yang lebih luas juga dapat mengatur kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Lindback, 2006). Apalagi studi Bailey (2015) mengindikasikan bahwa sistem negara kesejahteraan adalah prasyarat untuk pembangunan yang ramah dengan lingkungan hidup. Jika pemerintah berkomitmen menjalankan prinsip negara kesejahteraan, maka seharusnya konflik antara masyarakat Pangkalan Susu dengan korporasi pengelola PLTU tak terjadi.

Selain itu, Leila, Salim, dan Sari juga merasa tak diakui oleh pihak PLTU dan pemerintah setempat. Dalam hal ini, mereka merasa tak adanya relasi timbal balik antara masyarakat dengan pengelola PLTU dan pemerintah. Rasa tak diakui muncul karena pengelola PLTU dan pemerintah yang tak acuh dengan keluhan serta dampak negatif yang dirasakan masyarakat.

Leila merasa korporasi pengelola PLTU hanya mementingkan diri sendiri sehingga tak

peduli dengan dampak negatif yang dirasa masyarakat dari pengoperasian PLTU. Ia merasa tak diakui karena menganggap pengelola PLTU mencari keuntungan dari penderitaannya dan masyarakat lainnya.

Bagi Salim, tak adanya tanggapan dari keluhan dan tuntutan masyarakat menunjukkan bahwa pihak PLTU maupun pemerintah memang tak mengakui dirinya dan warga lainnya yang melakukan aksi sosial. Ia juga merasa pengaduan formal tak lagi berguna.

Begitu juga dengan Sari, yang merasa penderitaannya tak dipedulikan oleh pihak PLTU maupun pemerintah. Padahal masyarakat sudah menyampaikan keluhannya secara terbuka dan berulang kali.

Rasa tak diakui ini juga membuat Leila, Salim dan Sari mengalami krisis kepercayaan kepada pihak yang punya tanggung jawab—baik itu korporasi pengelola PLTU ataupun pemerintah. Tak hanya karena diabaikan, mereka juga merasa dibohongi. Mereka merasa korporasi pengelola PLTU tak menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan pemerintah tak mampu melindungi warganya.

Leila awalnya menyambut baik pembangunan PLTU karena pihak PLTU menjanjikan bahwa perekonomian di daerah Pangkalan Susu akan meningkat, namun yang ia rasakan malah sebaliknya: penghasilannya sebagai petani menurun drastis. Akibatnya, ia tak percaya lagi dengan PLTU.

Untuk Salim, kelakuan pemerintah setempat dan pihak kepolisian yang tak peduli dengan laporan masyarakat buatkan hilang kepercayaan kepada mereka. Ia merasa “rakyat kecil” seperti dirinya tak berguna lapor ke pemerintah setempat dan aparat kepolisian.

Begitu juga dengan Sari. Menurutnya, korporasi pengelola PLTU dan pemerintah setempat masa bodoh dengan nasib “rakyat kecil” seperti dirinya. Belum adanya tanggapan dari mereka atas keluhan masyarakat menegaskan hal tersebut. Kepercayaan mereka kepada PLTU dan pemerintah semakin menipis.

Rasa tak diakui dan krisis kepercayaan kepada pihak yang punya tanggung jawab ini menegaskan kembali bahwa pemerintah kurang menjalankan prinsip negara kesejahteraan. Akibatnya, terjadi konflik antara masyarakat dengan korporasi pengelola PLTU. Padahal, kehadiran negara sangat diperlukan dalam konflik antara masyarakat vs. korporasi, terutama untuk memastikan tak adanya pihak yang merasa dirugikan. Hal ini dapat terlihat dalam konflik antara masyarakat dengan korporasi pengelola PLTU Teluk Sepang, Bengkulu, yang mana kehadiran negara lewat BKSDA dan PTUN dapat mengurai konflik (Pratama dkk, 2021). Begitu juga dengan konflik antara masyarakat adat Sedulur Sikep dengan PT SMS, korporasi pengelola pabrik semen di Pati, Jawa Tengah, yang mana campur tangan Presiden dapat

meredakan konflik (Suharko, 2016).

Tak hanya menyelesaikan konflik, peran negara juga sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang sesuai dengan konsep negara kesejahteraan dan *good governance*, seperti memenuhi kebutuhan dasar warganya, menyediakan pelayan kesejahteraan sosial, dan melindungi rakyatnya (Kartika dkk, 2018). Menurut analisis Garland (2014), masyarakat yang hanya diatur oleh sistem kapitalisme sangat beresiko terjadi konflik, sebab sistem itu cenderung menciptakan konsentrasi kekayaan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan sistem negara kesejahteraan sebagai tandingan: untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk sistem kapitalisme. Dalam semangat ini, pemerintah harus selalu hadir dalam konflik kepentingan ekonomi antara masyarakat dengan korporasi—bahkan mencegahnya, sehingga masyarakat tak merasa kurang diakui bahkan mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Indonesia sebagai negara kesejahteraan punya kewajiban melindungi masyarakatnya dari pengaruh buruk kapitalisme, namun masyarakat Pangkalan Susu—dalam konfliknya dengan korporasi pengelola PLTU batubara di daerah meraka—tak merasa perlindungan itu. Akibatnya, mereka melihat pihak PLTU seenaknya beroperasi tanpa memperdulikan pengaruh buruk kepada lingkungan. Kerusakan lingkungan kemudian membuat penghasilan mereka makin berkurang. Tak hanya itu, keluhan dan tuntutan masyarakat juga tak dianggap oleh pihak PLTU maupun pemerintah setempat, sehingga menimbulkan rasa tak diakui dan krisis kepercayaan.

Berbagai kondisi tersebut bukanlah prasyarat untuk masyarakat yang ideal. Jika dibiarkan, ditakutkan—seperti analisis Garland (2016)—akan terjadi konflik yang semakin besar antara masyarakat dengan korporasi. Negara—melalui berbagai aparaturnya—harus hadir, memberi solusi untuk konflik ini.

Dari pengalaman-pengalaman informan dan berbagai penelitian relevan, batubara bukanlah bahan bakar terbaik untuk pengoperasian PLTU: dampaknya sangat buruk untuk lingkungan. Solusi jangka panjangnya, pemerintah harus buat regulasi yang lebih ketat terkait izin penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. Bukan malah sebaliknya, seperti mencabut limbah pembakaran batubara (Fly Ash dan Bottom Ash) dari daftar Limbah B3 dalam UU Cipta Kerja. Jika pemerintah berkomitmen atas prinsip negara kesejahteraan seperti yang banyak tertulis dalam konstitusi (Palguna, 2019), harusnya regulasi terkait perlindungan masyarakat dari pengaruh buruk kapitalisme makin diperketat—bukannya dideregulasi.

Nasib masyarakat Pangkalan Susu yang menerima dampak buruk pengoperasian PLTU berada di tangan pemerintah. Jika dibiarkan saja, maka akan banyak masyarakat yang terancam kehilangan mata pencaharian—mengingat mayoritas masyarakat berpenghasilan dari alam. Bagaimanapun, dari semua masyarakat Pangkalan Susu yang bekerja, sekitar 56 persennya petani. Belum lagi terhitung jumlah nelayan. Dari seluruh luas Kec. Pangkalan Susu, sekitar 80 persennya juga merupakan lahan pertanian (BPS Kab. Langkat, 2021). Jika alam mereka rusak, maka penghasilan mereka juga hilang.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mimi, Mak Ijah, dan Bang Aji, yang sangat banyak membantu dalam proses penelitian di lapangan, sehingga penelitian dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, D. (2015). The Environmental Paradox of the Welfare State: The Dynamics of Sustainability. *New Political Economy*, 20 (6): 793 – 811.
- BPS Kab. Langkat. (2021). *Kecamatan Pangkalan Susu dalam Angka 2021*. Langkat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat.
- Briggs, A. (1961). The Welfare State in Historical Perspective. *European Journal of Sociology*, 2 (2): 221 – 258.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- DJPPR Kemenkeu. (2015). *Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Dengan CEXIM Untuk Pembiayaan Proyek Takalar Steam Power Plant Dan Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI. 29 Januari. Tersedia di: <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1177>
- EJAtlas. (2020). *Pangkalan Susu Coal-fired Power Plant, North Sumatra, Indonesia*. Environmental Justice Atlas. Barcelona. Tersedia di: <https://ejatlas.org/print/pangkalan-susu-coal-fired-power-plant-north-sumatra-indonesia>
- Garland, D. (2014). The Welfare State: A Fundamental Dimension of Modern Government. *European Journal of Sociology*, 55 (3): 327 – 364.
- Greenpeace Indonesia. (2016). *Kita, Batubara & Polusi Udara: Riset Dampak PLTU Batubara oleh Tim Peneliti Universitas Harvard – Atmospheric Chemistry Modelling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia*. Tersedia di: <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/1223/hasil-penelitian-harvard-ancaman-maut-pltu-batu-bara-indonesia/>
- Hidayat, A. (2020). *PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 Beroperasi Tingkatkan Pasokan Listrik Sumatera Utara*. PLN. 11 Maret. Tersedia di: <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2020/03/pltu-pangkalan-susu-unit-3-dan-4-beroperasi-tingkatkan-pasokan-listrik-sumatera-utara/>
- Kahija, YF. L. (2017). *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kartika, A., Harahap, D., & Iskandar, B. (2018). Optimizing the Concept of Welfare State and Good Governance in the Prevention of Social Conflict. *Proceedings of the 7th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR 2018)*, 291-296.
- Karokaro, A. S. (2019a). *Bongkar Muat Batubara PLTU Pangkalan Susu Potensi Cemari Laut, Berikut Foto dan Video*. Mongabay. 21 Agustus. Tersedia di: <https://www.mongabay.co.id/2019/08/21/bongkar-muat-batubara-pltu-pangkalan-susu-potensi-cemari-laut-berikut-foto-dan-video/>
- Karokaro, A. S. (2019b). *Nelayan dan Petani di Langkat Serukan Setop Energi Batubara, Alihkan ke Terbarukan*. Mongabay. 29 Juni. Tersedia di: <https://www.mongabay.co.id/2019/06/29/nelayan-dan-petani-di-langkat-serukan-setop-energi-batubara-alihkan-ke-terbarukan/>
- Lindback, A. (2006). The Welfare State — Background, Achievements, Problems. *IFN Working Papers*, No. 662.
- Nasihah, M. (2017). Efek Hujan Asam terhadap Pertumbuhan Tanaman. *Jurnal EnviScience*, 1 (1): 27-30.
- Palguna, I D. G. (2019). *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- PLN. (2015). *Melongok PLTU Pangkalan Susu di Lahat, Sumatera Utara*. PLN. 23 Mei. Tersedia di: <https://web.pln.co.id/cms/media/warta-pln/2015/05/melongok-pltu-pangkalan-susu-di-lahat-sumatera->

[utara/](#)

- Pramanik, A., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 17 (2): 248 – 256.
- Pratama, A., Wardaya, S., & Himawati, I. P. (2021). Upaya Resolusi Konflik Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Teluk Sepang, Bengkulu. *Community*, 7 (1): 26 – 39.
- Subhas, A., Kalyan, A., & Koushik, B. (2017). Impact of Coal-Fired Thermal Power Plant on Agricultural Production. *International Journal of Agriculture Sciences*, 9 (39): 4597 – 4603.
- Suharko. (2016). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20 (2): 97 – 116.
- Urrohmah, N., Kelly, K. C., & Yuliani, F. (2020). Gerakan Kontra Pembangunan Shelter 9 dan 10 PLTU Suralaya Merak-Banten. *International Journal of Demos*, 2 (2): 137 – 150.
- Widiawaty, M. A., Nurhanifah, Ismail, A., & Dede, M. (2020). The impact of Cirebon coal-fired power plants on water quality in Mundu Bay, Cirebon Regency. *SUSTINERE: Journal of Environment and Sustainability*, 4 (3): 189 – 204.